



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKMAL ABBAS, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagasiaplaki, 15 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU,

(AKMAL ABBAS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HILIR,

(ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR  
TAHUN 2025**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	94
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas dan Pemulihan Asel serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Asel Negara	100%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	100%
4	Memperkuatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	73,5
		Nilai Kinerja Anggaran	90,5

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.478.208.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.704.428.000
	Jumlah	Rp. 11.182.634.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir.

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Bagasapipt, 15 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU,  
  
 (AKMAL ABBAS, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
 ROKAN HILIR,  
  
 (ANDI ANINDYA PUTERA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MONA SITI H. SIMANJUNTAK, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Baganuaiapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.)

(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akseleerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100%
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	88%
3	Meningkatnya tertib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	80%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum	Persentase kepuasan terhadap layanan hukum dan masing-masing Satker	94

No	Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Umum	Rp 26.440.000,-
2	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 8.444.386.000,- RP 6.370.886.000,- RP 2.073.500.000,-
3	Layanan Sarana Internal	RP 250.000.000,-
Jumlah		RP 8.700.826.000,-

#### D. PRIORITAS NASIONAL

1. Optimalisasi SAKIP

#### E. KINERJA TAMBAHAN

Bagansiapipi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,



(ANDI AGUS MIRA PUTERA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama:

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YOPENTINU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansari, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,



(ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,

(YOPENTINU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI INTELJEN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan operasi inteljen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan.	Persentase pelaksanaan operasi inteljen yang berkaitan dengan bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan $\frac{\text{9 Laporan}}{\text{9 Surat Perintah}} \times 100 = 100\%$	100%
2	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Inteljen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan Operasi Inteljen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan $\frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Surat Perintah}} \times 100 = 100\%$	100%
4	Meningkatnya kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis $\frac{2 \text{ Laporan}}{2 \text{ Surat Perintah}} \times 100 = 100\%$	100%
5	Meningkatnya operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	Persentase pelaksanaan Operasi Intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen	100%
6	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum	Persentase lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum 1. Jumlah Penerima Penerangan Hukum $\frac{\text{Jumlah target penerima penerangan hukum}}{2 \text{ Lembaga}} \times 100 = 100\%$ 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum $\frac{\text{Jumlah target penerima penyuluhan hukum}}{4 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$	100%
7	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan penyuluhan dan penerangan hukum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Kegiatan/ Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan	Rp 40.000.000
2	Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	Rp 58.008.000
3	Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi	Rp 20.000.000

4	Lembaga yang Telah diberi Penerangan Hukum	Rp 38.976.000
5	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	Rp 52.400.000
6	DPO	Rp 30.000.000
Jumlah		Rp 239.384.000

**D. PRIORITAS NASIONAL**

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bagansiapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,

KEPALA SEKSI INTELIJEN,



(AND) EDGA WINA PUTERA, S.H., M.H.)

(YOPENTIMU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LITA WARMAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapipi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR



ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.

LITA WARMAN, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2	Meningkatnya kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100%

		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van gewijsde</i> (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Praperuntutan	Rp. 119.790.000
2	Penuntutan	Rp. 1.154.340.000
3	Eksekusi	Rp. 69.000.000
	Jumlah	Rp. 1.343.130.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bagansiapipi, 18 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR



ANDI SETAWARA PUTERA, S.H., M.H.



LITA WARMAN, S.H., M.H.



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : MISAEL ASARYA TAMBUNAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapilapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

(ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.)

(MISAEL ASARYA TAMBUNAN, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyelidikan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penyidikan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Persentase Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi	100%
		Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur Pidana Khusus	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara transparan, akuntabel dan profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai, dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabean, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Tahap Penyelidikan	Rp.82.082.000
2	Tahap Penyidikan	Rp.206.000.000
3	Tahap Pra Penuntutan	Rp.680.000
4	Tahap Penuntutan	Rp.239.220.000
5	Tahap Eksekusi	Rp.64.960.000
	Jumlah	Rp.602.942.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) yang saat ini dimanfaatkan/ dipergunakan sebagai lahan/ perkebunan sawit tanpa hak yang jelas

#### E. KINERJA TAMBAHAN

- 1 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bagansiapiapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,



(ANDAS KAMBRA PUTERA, S.H., M.H.)

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS,

(MISAEI ASARYA TAMBUNAN, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selaku elasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagan/lempi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR



(ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA

(WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akseierasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100 %
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100 %
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100 %
3	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100 %
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis kepada Masyarakat	Rp. 7.200.000
3	Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum	Rp. 13.200.000
4	Pengelolaan Halo JPN	Rp. 6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan Data Desa	Rp. 24.000.000
	Jumlah	Rp. 80.400.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

- Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No	Nama Instansi	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Penambahan Ruang Puskesmas Beai Jaya,	Rp.2.676.375.110
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Penambahan Ruang Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan,	Rp.2.729.487.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Puskesmas Pembantu Panipahan	Rp.625.738.848
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu Pulau Halang Hulu,	Rp.799.645.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu Sibabo Kota,	Rp.799.645.000

6	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Sisa Pekerjaan Pembangunan laboratorium kesehatan daerah)	Rp.395.200.000
7	RSUD DR. RM Pratomo Bagansiapiapi	Pembangunan Gedung Baru Hemodialisa Tahun 2025	Rp.2.341.593.180
8	RSUD DR. RM Pratomo Bagansiapiapi	Pendampingan Hukum Pembanguna Gedung Cytotoxic Tahun 2025	Rp.1.400.000.000

#### E. KINERJA TAMBAHAN

No	Indikator Kinerja Tambahan	Formulasi	Target
1	Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	100%
2	Tim Pengamanan dan Penyelamatan Aset Daerah	-	100%
3	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-	100 %

Bagansiapiapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR,

  
(ANDI ABU MENTERA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA,

  
(WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GILANG OLLA RAHMADHAN, S.H., M.Kn.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,

  
(ANDI ADIKAWIRA PUTERA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

  
(GILANG OLLA RAHMADHAN, S.H., M.Kn.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI**  
**KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	100%
		Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	100%
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset	87%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pemeliharaan Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 97.960.000
2	Pemusnahan Barang Bukti	Rp. 35.800.000
3	Penyelesaian Barang Rampasan/Sitaan	Rp. 16.250.000
4	Delivery	Rp. 49.800.000
Jumlah		Rp. 200.000.000

**D. PRIORITAS NASIONAL**

**E. KINERJA TAMBAHAN**

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bagansiapi, 16 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN  
HILIR,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN  
PENGELOLAAN BB,

  
(ANDI AKBAR W. MUTERA, S.H., M.H.)

  
(GILANG OLLA RAHMADHAN, S.H., M.Kn.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GENTA PATRI PUTRA, S.H.  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI I PADA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOPENTINU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansapipi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR,

  
(YOPENTINU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI I,

  
(GENTA PATRI PUTRA, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGUNG DWI WICAKSONO, S.H.  
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI II PADA SEKSI INTELIJEN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOPENTINU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJAKSAAN NEGERI  
ROKAN HILIR.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 17 Januari 2025.

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI INTELIJEN  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR,

  
(YOPENTINU ADI NUGRAHA, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI II,

  
(AGUNG DWI WICAKSONO, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DANIEL SITORUS, S.H.  
Jabatan : KASUBSI PRAPENUNTUTAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LITA WARMAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN  
NEGERI ROKAN HILIR

Sebagai atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogansapiagi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

(LITA WARMAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASUBSI PRAPENUNTUTAN

(DANIEL SITORUS, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2	Meningkatnya kualitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van</i>	

		gawusidaznak (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Prapenuntutan	Rp. 119.790.000
2	Penuntutan	Rp. 1.154.340.000
3	Eksekusi	Rp. 69.000.000
	Jumlah	Rp. 1.343.130.000

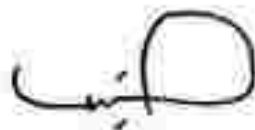
**D. PRIORITAS NASIONAL**

**E. KINERJA TAMBAHAN**

Bagansiapapi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR



(LITA WARMAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASUBSI PRAPENUNTUTAN



(DANIEL SITORUS, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LANI REGINA YULANDA, S.H.  
Jabatan : KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI, DAN EKSAMINASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LITA WARMAN, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJAKSAAN  
NEGERI ROKAN HILIR

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Begansiaptapi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR

(LITA WARMAN, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI,  
DAN EKSAMINASI

(LANI REGINA YULANDA, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penyelesaian penanganan perkara Tindak Pidana Umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif	Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif	100%
2.	Meningkatnya kualitas Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Pra-Penuntutan	100%
		Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga Penuntutan	
		Persentase perkara tindak pidana umum yang <i>in kracht van</i>	

		gawat/cezaak (Berkekuatan hukum tetap) yang telah dieksekusi	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum bidang tindak pidana umum	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Prapenuntutan	Rp. 119.790.000
2	Penuntutan	Rp. 1.154.340.000
3	Eksekusi	Rp. 69.000.000
Jumlah		Rp. 1.343.130.000

**D. PRIORITAS NASIONAL**

**E. KINERJA TAMBAHAN**

Bagansiapli, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI,  
DAN EKSAMINASI**



(LITA WARMAN, S.H., M.H.)



(LANI REGINA YULANDA, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELSA KARINA BR GULTOM, S.H.  
Jabatan : KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

(WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA,

(ELSA KARINA BR GULTOM, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya keberhasilan Penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100 %
		Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui jalur Non Litigasi	100 %
		Persentase perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui jalur Litigasi	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan Negara melalui jalur perdata	Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	100 %
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	100 %

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis kepada Masyarakat	Rp. 7.200.000
3	Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum	Rp. 13.200.000
4	Pengelolaan Halo JPN	Rp. 6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000
	Jumlah	Rp. 80.400.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

##### - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No	Nama Instansi	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Penambahan Ruang Puskesmas Balai Jaya;	Rp.2.676.375.110
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Penambahan Ruang Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan;	Rp.2.729.467.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Puskesmas Pembantu Panipahan	Rp.625.738.848
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu Pulau Halang Hulu;	Rp.799.945.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu Sinaboi Kota;	Rp.799.945.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Sisa Pekerjaan Pembangunan laboratorium kesehatan daerah).	Rp.395.200.000

7	RSUD DR RM Pratomo Bagansiapiapi	Pembangunan Gedung Baru Hemodialisa Tahun 2025	Rp.2.341.593.180
8	RSUD DR RM Pratomo Bagansiapiapi	Pendampingan Hukum Pembanguna Gedung Cytotoxic Tahun 2025	Rp.1.400.000.000

**E. KINERJA TAMBAHAN**

No	Indikator Kinerja Tambahan	Formulasi	Target
1	Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	100%
2	Tim Pengamanan dan Penyelamatan Aset Daerah	-	100%
3	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-	100 %

Bagansiapiapi, 17 Januari 2025


Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

  
(WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN  
TATA USAHA NEGARA,

  
(ELSA KARINA BR GULTOM, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADINI CISTA, S.H.  
Jabatan : KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansiapiapi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

(WIRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN  
HUKUM,

(NADINI CISTA, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**  
**KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	100 %
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum perdata dan tata usaha negara	100 %

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	hukum lain		

No	Kegiatan	Anggaran
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Rp. 30.000.000
2	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis kepada Masyarakat	Rp. 7.200.000
3	Pertimbangan Hukum/ Pendampingan Hukum/Bantuan Hukum	Rp. 13.200.000
4	Pengelolaan Halo JPN	Rp. 6.000.000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	Rp. 24.000.000
	Jumlah	Rp. 80.400.000

#### D. PRIORITAS NASIONAL

##### - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

No	Nama Instansi	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Penambahan Ruang Puskesmas Balai Jaya;	Rp.2.676.375.110
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Penambahan Ruang Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan;	Rp.2.729.467.000
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Renovasi Puskesmas Pembantu Panipahan	Rp.625.738.848
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu Pulau Halang Hulu;	Rp.799.945.000
5	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Baru Puskesmas Pembantu Sinaboi Kota;	Rp.799.945.000
6	Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Sisa Pekerjaan Pembangunan laboratorium kesehatan daerah).	Rp.395.200.000
7	RSUD DR RM Pratomo Bagansiapiapi	Pembangunan Gedung Baru Hemodialisa Tahun 2025	Rp.2.341.593.180
8	RSUD DR RM Pratomo Bagansiapiapi	Pendampingan Hukum Pembanguna Gedung Cytotoxic Tahun 2025.	Rp.1.400.000.000

**E. KINERJA TAMBAHAN**

No	Indikator Kinerja Tambahan	Formulasi	Target
1	Tim Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	100%
2	Tim Pengamanan dan Penyelamatan Aset Daerah	-	100%
3	Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-	100 %

Bagansipati, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA  
USAHA NEGARA,

  
(WRAWAN PRABOWO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB SEKSI PERTIMBANGAN  
HUKUM,

  
(NADINI CISTA, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JAMILAH, S.H.  
Jabatan : KAUR PERLANGKAPAN, DASKRIMTI MADYA WIRA TU

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H., M.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansipati, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KAUR PERLANGKAPAN, DASKRIMTI MADYA  
WIRA TU,

(JAMILAH, S.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**C. KINERJA UTAMA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	88%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya terbit penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat peneruhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	80%

No	Rincian Output	
1	Layanan Umum	Rp 26.440.000,-
2	Layanan Sarana Internal	Rp 230.000.000,-
Jumlah		Rp 256.440.000,-

#### D. PRIORITAS NASIONAL

#### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bogansapi-api, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KAUR PERLANGKAPAN, DASKRIMI  
MADYA DIRA TU,



(JAMILAH, S.H.)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : MUIAMMAD NASIR, S.T  
Jabatan : PIL. KAUR KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lamiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagansari-epi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

PIL. KAUR KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,

(MUIAMMAD NASIR, S.T)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80%

No	Rincian Output	
1	Layanan Perkantoran - Gaji dan Tunjangan	Rp 6.370.886.000,-
	Jumlah	Rp 6.370.886.000,-

### D. PRIORITAS NASIONAL

1. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direksi/Instruksi Jaksa Agung.

Baganlapi-apt, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,



(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

PI. KAUR KEPEGAWAIAN KEUANGAN DAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK,



(MUHAMMAD NASIR, S.T)



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PITRI NANDA PRAKARSA GULTOM A.Md  
Jabatan : PL. KEPALA TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN DAN DATA  
STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MONA GITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.  
Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bagonsiapi-sipi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN,

PL. KEPALA TATA USAHA DAN  
PERPUSTAKAAN DAN DATA STATISTIK  
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI,

(MONA GITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.)

(PITRI NANDA PRAKARSA GULTOM A.Md)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**

**A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025**

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

**B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025**

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

### C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Kejaksaan RI	Persentase sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan	90%
2	Meningkatnya terib penyelenggaraan tata kelola aset	Tingkat pemenuhan inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara	90%

No	Rincian Output	
1	Layanan Umum	Rp 28.440.000,-
2	Layanan Sarana Internal	Rp 230.000.000,-
	Jumlah	Rp 258.440.000,-

### D. PRIORITAS NASIONAL

1. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

### E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Kementerian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Bagan/taipi-asi, 17 Januari 2025

Pihak Kedua,

KEPALA SUBBAGIAN PEMERINAAAN,



(MONA SITI H SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

PI. KEPALA TATA USAHA DAN  
PERPUSTAKAAN DAN DATA STATISTIK  
KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI,



(PITRI NANDA PRAKARSA GULTOM A M)